

## Pancasila: Mantra Kosong Atau Pedoman Bangsa? Menggali Akar Kesenjangan Implementasi

M Iqbal<sup>1</sup> Mawaddah<sup>2</sup> Arisya Rajagukguk<sup>3</sup> Nursalsabilah Harahap<sup>4</sup> Fandi Saputra Nduru<sup>5</sup>  
Suci Larasati<sup>6</sup> Adinda Dwi Saputri<sup>7</sup>

Jurusan Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara,  
Indonesia<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup>

Email: [mawaddairc@gmail.com](mailto:mawaddairc@gmail.com)<sup>1</sup> [arisyarajagukguk9@gmail.com](mailto:arisyarajagukguk9@gmail.com)<sup>3</sup>

### Abstrak

Berbicara tentang Pancasila, semua orang selalu merasa paling pandai dalam menjelaskannya, namun apakah hal tersebut sesuai dengan implementasi di dunia nyata? Pancasila sebagai dasar negara Indonesia seharusnya menjadi pedoman utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, dalam praktiknya, sering muncul kesenjangan antara nilai-nilai Pancasila dan implementasinya dalam berbagai aspek kehidupan, baik di ranah politik, hukum, sosial, maupun ekonomi. Artikel ini mengeksplorasi akar permasalahan dari kesenjangan tersebut dengan menelusuri faktor historis, struktural, serta dinamika sosial yang memengaruhi penerapan Pancasila. Apakah Pancasila hanya menjadi sekadar mantra kosong tanpa makna substantif, atau masih berfungsi sebagai pedoman bangsa? Melalui pendekatan kualitatif dengan analisis terhadap kebijakan dan praktik sosial, penelitian ini berupaya mengidentifikasi tantangan serta menawarkan solusi untuk memperkuat aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

**Kata Kunci:** Pancasila, Implementasi, Masyarakat, Indonesia

### Abstract

Talking about Pancasila, everyone always feels the most clever in explaining it, but does it match the implementation in the real world? Pancasila as the foundation of the Indonesian state should be the main guideline in national and state life. However, in practice, there is often a gap between the values of Pancasila and its implementation in various aspects of life, both in the political, legal, social, and economic realms. This article explores the root causes of this gap by tracing the historical, structural, and social dynamics factors that influence the implementation of Pancasila. Is Pancasila just an empty mantra without substantive meaning, or does it still function as a guideline for the nation? Through a qualitative approach with analysis of social policies and practices, this study seeks to identify challenges and offer solutions to strengthen the actualization of Pancasila values in national and state life.

**Keywords:** Pancasila, Implementation, Public, Indonesia



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## PENDAHULUAN

Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang telah disepakati sejak awal kemerdekaan sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lima sila yang terkandung dalam Pancasila mencerminkan nilai-nilai luhur yang diharapkan menjadi dasar dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, serta perilaku masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, dalam realitasnya, implementasi nilai-nilai Pancasila masih menghadapi banyak tantangan dan hambatan yang menyebabkan kesenjangan antara idealisme dan praktik di lapangan. Sejak awal kemerdekaan, Pancasila telah mengalami berbagai tantangan dalam implementasinya, terutama karena dinamika politik yang terus berubah. Pada masa Orde Lama, Pancasila digunakan sebagai alat untuk membangun identitas nasional dalam menghadapi berbagai ideologi yang berkembang. Orde Baru kemudian memanfaatkan Pancasila sebagai alat legitimasi kekuasaan dengan menerapkan asas tunggal

Pancasila, tetapi justru menciptakan represi terhadap kebebasan berpikir dan berserikat. Reformasi membawa kebebasan yang lebih luas, tetapi juga menimbulkan tantangan baru dalam menjaga keselarasan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (Muttaqin, 2019)

Salah satu indikasi kesenjangan implementasi Pancasila terlihat dalam ranah politik dan hukum. Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme masih marak terjadi di berbagai lembaga pemerintahan, meskipun Pancasila menekankan prinsip keadilan sosial dan kepemimpinan yang berintegritas. Penegakan hukum yang seharusnya berlandaskan nilai-nilai keadilan sering kali justru tumpul ke atas dan tajam ke bawah, memperlihatkan adanya ketimpangan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip Pancasila di bidang hukum dan pemerintahan. Dalam aspek sosial dan budaya, nilai-nilai Pancasila juga kerap terpinggirkan oleh munculnya segregasi sosial, intoleransi, dan konflik berbasis identitas. (Dunn et al., 2011). Di tengah keberagaman budaya, suku, dan agama yang menjadi kekayaan bangsa, masih terdapat kelompok-kelompok tertentu yang kurang menghargai perbedaan dan cenderung memperkuat eksklusivitas. Fenomena ini menunjukkan bahwa nilai-nilai persatuan dan keadilan sosial dalam Pancasila belum sepenuhnya terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat.

Dari perspektif ekonomi, ketimpangan sosial masih menjadi permasalahan yang signifikan. Sila kelima Pancasila, yakni "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," seharusnya menjadi dasar dalam distribusi kesejahteraan yang merata. Namun, kenyataannya, kesenjangan ekonomi antara kelompok masyarakat miskin dan kaya masih sangat tinggi. (Amanda Selviana et al., 2024). Akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja yang tidak merata menjadi tantangan besar dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pendidikan sebagai salah satu sarana utama dalam membentuk karakter bangsa juga menghadapi tantangan dalam menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila. Kurikulum pendidikan nasional telah memasukkan pendidikan Pancasila, tetapi implementasi di lapangan sering kali masih bersifat formalitas dan kurang mampu membangun pemahaman serta pengamalan yang mendalam. Akibatnya, generasi muda kurang memiliki kesadaran kritis terhadap nilai-nilai Pancasila dan cenderung lebih mudah terpengaruh oleh ideologi-ideologi lain yang bertentangan dengan semangat kebangsaan.

Di era digital, tantangan baru dalam implementasi Pancasila semakin kompleks dengan maraknya disinformasi, ujaran kebencian, dan penyebaran ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan. Media sosial, yang seharusnya menjadi sarana untuk memperkuat solidaritas dan persatuan, justru sering digunakan untuk memperkeruh perbedaan dan memperuncing konflik sosial. Hal ini menjadi indikasi bahwa nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya menjadi pedoman dalam berinteraksi di ruang digital. Berbagai tantangan dalam implementasi Pancasila tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah Pancasila masih menjadi pedoman bangsa, atau hanya sekadar mantra kosong yang kehilangan maknanya dalam kehidupan nyata? Jika Pancasila hanya dijadikan sebagai slogan tanpa implementasi yang konkret, maka eksistensinya sebagai dasar negara dan ideologi bangsa akan semakin tergerus oleh dinamika zaman. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam untuk menggali akar permasalahan dari kesenjangan implementasi Pancasila agar dapat ditemukan solusi yang tepat untuk memperkuat aktualisasinya. (Amanda Selviana et al., 2024).

Penelitian ini berupaya mengeksplorasi faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan dalam implementasi nilai-nilai Pancasila, baik dari segi historis, struktural, maupun kultural. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menganalisis kebijakan, perilaku sosial, serta tantangan yang dihadapi dalam mengaktualisasikan Pancasila di berbagai bidang. Selain itu, penelitian ini juga menawarkan strategi untuk memperkuat internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan memahami akar permasalahan

dari kesenjangan implementasi Pancasila, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih efektif untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman yang nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa implementasi yang konkret, Pancasila akan kehilangan relevansinya dan hanya menjadi sekadar wacana tanpa makna substantif bagi masyarakat Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (library research), (Ummah, 2019) dalam Dumay et al. (2016) mendefinisikan kajian literatur sebagai metode untuk menelaah berbagai literatur ilmiah guna memperluas pemahaman, melakukan refleksi kritis, menentukan arah penelitian mendatang, dan merumuskan pertanyaan penelitian. Fink (2014) menjabarkan langkah-langkah kajian literatur sebagai berikut: (1) pertanyaan penelitian, (2) merumuskan) memilih basis data yang relevan (artikel, situs web, dan sumber lainnya), (3) menentukan kata kunci pencarian, (4) menetapkan kriteria dan metodologi, dan (5) melakukan tinjauan literatur. Untuk menganalisis berbagai sumber tertulis mengenai penerapan Pancasila dari perspektif sejarah, politik, sosial, dan ekonomi. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-kritis, dengan tujuan mengkaji kesenjangan antara idealisme Pancasila sebagai dasar negara dan realitas penerapannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode studi kasus untuk memahami implementasi Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Pendekatan ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana nilai-nilai Pancasila benar-benar menjadi pedoman bagi bangsa atau sekadar retorika dalam wacana publik dan kebijakan negara.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Ideologi merupakan fondasi yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Ideologi yang berlandaskan materialisme beranggapan bahwa manusia diatur oleh prinsip-prinsip materialisme. Dalam pandangan komunis, terdapat hubungan antara agama dan negara. Menurut Karl Marx, manusia menentukan dirinya sendiri, sementara agama dianggap sebagai kesadaran manusia sebelum ia menemukan jati dirinya. Dalam perspektif komunis, kehidupan manusia adalah hasil dari interaksi individu yang membentuk masyarakat dan negara. Agama, di sisi lain, dipandang sebagai keluhan dari mereka yang tertindas. Oleh karena itu, mereka menolak agama dan mengedepankan aspek material, karena manusia dianggap sebagai entitas material. Pada abad pertengahan, Perancis berhasil memisahkan agama dari negara dengan mengakui keberadaan agama secara tidak langsung. Hal ini berkontribusi pada pencapaian ideologi kapitalisme yang berlandaskan kompromi. Dalam pandangan sekuler, agama dan negara dianggap sebagai dua hal yang tidak dapat disatukan. Hal ini disebabkan oleh perbedaan esensial di antara keduanya: agama berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan, sedangkan negara mengatur interaksi sosial antar manusia. Sementara itu, dalam ideologi Islam, agama dan pemerintahan saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Beberapa tokoh agama berpandangan bahwa agama dan negara adalah dua hal yang berhubungan erat, sementara yang lain berpendapat bahwa keduanya merupakan satu kesatuan yang saling menopang—tanpa negara yang memiliki kekuatan hukum, agama bisa terancam, begitu pula sebaliknya.

Lalu, bagaimana dengan Pancasila? Sejarah mencatat adanya penyimpangan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila sejak era Orde Lama, seperti pengangkatan Presiden seumur hidup dan penerapan konsep NASAKOM (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme). Konsep NASAKOM dianggap bertentangan dengan sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada masa Orde Baru, Pancasila dan UUD 1945 dijadikan simbol ideologi, tetapi

pemerintah justru dituduh menyalahgunakan keduanya demi kepentingan kekuasaan. Dalam praktiknya, Pancasila hanya dijadikan slogan politik, sementara sistem pemerintahan yang sentralistik justru memicu praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Mereka yang menentang kebijakan tersebut sering kali dicap sebagai anti-Pancasila dan anti-pemerintah, sehingga mengalami tekanan politik. Situasi ini akhirnya berujung pada pengunduran diri Presiden Soeharto. (Wijayanto et al., 2023) Sementara itu, di masa reformasi, ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tetap dijadikan landasan meskipun telah mengalami empat kali amandemen. Amandemen ini berhasil mendorong proses demokratisasi dan desentralisasi. Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, dirumuskan untuk menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, dalam praktiknya, sering muncul pertanyaan mengenai sejauh mana Pancasila benar-benar diimplementasikan sebagai pedoman bangsa atau sekadar menjadi mantra kosong tanpa makna nyata.

### **Bidang Politik**

Berdasarkan (Beazant, 2006) Kebijakan negara dalam bidang politik harus berlandaskan pada manusia sebagai subjek yang mendukung nilai-nilai Pancasila. Seperti yang dikemukakan oleh Notonagoro (1975:23), manusia adalah makhluk yang berketuhanan, berkemanusiaan, bersatu, berkerakyatan, dan berkeadilan. Sebagai subjek negara, politik harus didasarkan pada penghormatan serta realisasi harkat dan martabat manusia. Dengan demikian, sistem politik negara harus mampu menjamin hak asasi manusia. Dengan kata lain, dalam perumusan kebijakan politik di Indonesia, kepentingan rakyat harus menjadi prioritas utama karena kedaulatan berada di tangan rakyat. Rakyat adalah sumber kekuasaan, sehingga politik di Indonesia harus berasal dari aspirasi rakyat, bukan dari kepentingan individu, kelompok, atau golongan tertentu. Hal ini sejalan dengan pendapat Kaelan (2000:238) yang menyatakan bahwa sistem politik Indonesia berakar pada hakikat manusia sebagai makhluk individu dan sosial dalam perannya sebagai rakyat. Selain itu, sistem politik yang diterapkan harus berlandaskan Pancasila sebagai pedoman moral dalam berpolitik. Oleh sebab itu, kebijakan negara di bidang politik harus mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur serta berpegang teguh pada cita-cita moral rakyat demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Namun apa yang di sampaikan di atas merupakan kebijakan politik yang berdasarkan Pancasila, Sedangkan yang terjadi serang ini terdapat Kesenjangan antara nilai-nilai Pancasila dan implementasinya tampak jelas dalam berbagai aspek kehidupan, terutama di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Di bidang politik, pragmatisme sering kali mengalahkan idealisme Pancasila. Banyak aktor politik yang lebih mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok daripada kepentingan bangsa secara keseluruhan. Fenomena ini menciptakan budaya politik yang jauh dari nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial dan musyawarah untuk mufakat. Akibatnya, keputusan politik sering kali tidak mencerminkan aspirasi rakyat dan lebih condong pada kepentingan elit tertentu. (Amanda Selviana et al., 2024) Selain itu, korupsi yang merajalela menjadi bukti nyata bahwa nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya diinternalisasi oleh para penyelenggara negara. Praktik korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merusak tatanan sosial dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa integritas dan moralitas, yang seharusnya menjadi landasan dalam menjalankan amanat Pancasila, sering kali diabaikan demi keuntungan sesaat. (Muttaqin, 2019)

### **Bidang Ekonomi**

Tak hanya itu pembahasa mengenai bidang ekonomi yang Berdasarkan (Beazant, 2006) Kebijakan negara dalam bidang ekonomi di Indonesia dirancang untuk membangun sistem

perekonomian yang berorientasi pada kepentingan rakyat serta menjunjung prinsip keadilan. Salah satu konsep yang sejalan dengan tujuan ini adalah gagasan ekonomi kerakyatan yang dikemukakan oleh Mubyarto, seperti yang dikutip oleh Kaelan (2000:239). Menurutnya, pengembangan ekonomi tidak hanya berfokus pada pertumbuhan, tetapi juga harus berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan dan kesejahteraan bagi seluruh bangsa. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi harus selaras dengan prinsip moral kemanusiaan. Oleh karena itu, sistem perekonomian yang berlandaskan Pancasila dan diterapkan dalam kebijakan ekonomi negara harus bebas dari praktik persaingan bebas, monopoli, serta bentuk-bentuk eksploitasi lain yang dapat merugikan rakyat dan menciptakan ketidakadilan. Sebaliknya, sistem ekonomi yang paling sesuai dengan nilai-nilai Pancasila adalah ekonomi kerakyatan, yaitu sistem yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Namun cerita mengenai sistem ekonomi menurut Pancasila ini tidak berjalan dengan baik alasannya di dunia nyata Sistem ekonomi yang seharusnya berlandaskan pada demokrasi ekonomi atau ekonomi kerakyatan sering kali tergeser oleh praktik-praktik neoliberalisme yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Akibatnya, transformasi perekonomian Indonesia yang seharusnya menuju ekonomi nasional justru berbelok arah menuju ekonomi neokolonial. Globalisasi juga memberikan tantangan tersendiri dalam implementasi Pancasila di bidang ekonomi. Masuknya budaya dan produk asing tanpa filter dapat menggerus nilai-nilai lokal dan kemandirian ekonomi bangsa. Jika tidak diantisipasi dengan kebijakan yang tepat, globalisasi dapat memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat. (Tria et al., 2022)

### **Bidang Pendidikan**

Pasal 31 ayat (1) menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Selanjutnya, pada ayat (2), disebutkan bahwa setiap warga negara diwajibkan menempuh pendidikan dasar, sementara pemerintah bertanggung jawab untuk membiayainya. Dari ketentuan ini, dapat dipahami bahwa mengikuti pendidikan dasar merupakan kewajiban mendasar bagi setiap individu. Sebagai bentuk pemenuhan kewajiban tersebut, ayat (3) mengatur bahwa pemerintah bertugas menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia guna mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam undang-undang. Selain itu, dalam upaya mencerdaskan bangsa, ayat (4) menetapkan bahwa negara harus mengalokasikan minimal 20% dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional. Pada ayat (5), dinyatakan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa. Hal ini bertujuan untuk mendorong kemajuan peradaban serta meningkatkan kesejahteraan umat manusia. (Beazant, 2006)

Namun yang terjadi di dunia nyata, masih terdapat ketimpangan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok ekonomi atas dan bawah. Sekolah di daerah terpencil sering kali kekurangan tenaga pendidik, fasilitas, dan akses internet, sedangkan di kota besar, sekolah memiliki fasilitas yang jauh lebih baik. Praktik komersialisasi pendidikan bertentangan dengan sila ke-5, yang menghendaki keadilan sosial bagi semua rakyat. Banyak lembaga pendidikan, termasuk perguruan tinggi, yang memberlakukan biaya pendidikan tinggi sehingga hanya mampu dijangkau oleh kalangan tertentu. Akibatnya, banyak anak berbakat dari keluarga miskin yang tidak bisa melanjutkan pendidikan tinggi. Permasalahan seperti ini bukan berlangsung 2 atau 3 tahun namun permasalahan ini tetap berlangsung bahkan sampai sekarang ini, apalagi dengan adanya kebijakan pemotongan

anggaran yang di lakukan. Yang dampaknya merembet kemana-mana dan bahlan sesuatu yang di prioritaskan seperti Pendidikan anak bangsa.

### **Sosial Budaya**

Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosial dan budaya, masyarakat dapat diajarkan untuk saling mengenal, menjalin hubungan baik dengan sesama warga negara, serta tidak mudah terpengaruh oleh provokasi. Namun, seiring berjalannya waktu, aspek sosial dan budaya di Indonesia semakin terabaikan. Sebagai negara yang memiliki keberagaman suku, budaya, agama, dan bahasa, Indonesia menghadapi tantangan di mana perbedaan tersebut sering kali dimanfaatkan sebagai alat untuk memecah belah bangsa. Perbedaan yang seharusnya menjadi kekayaan justru kerap dijadikan bahan provokasi antar kelompok, sehingga memudahkan rasa nasionalisme di kalangan masyarakat. Meski demikian, perpecahan dapat dihindari apabila setiap warga negara memahami dan mengamalkan makna Bhinneka Tunggal Ika serta menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosial dan budaya. Penerapan nilai-nilai Pancasila ini akan mendorong masyarakat untuk lebih mengutamakan persatuan dalam keberagaman daripada kepentingan individu atau kelompok yang dapat merusak kesatuan bangsa yang telah lama dibangun. (Amanda Selviana et al., 2024)

Teknologi informasi dan komunikasi telah merevolusi cara kita berkomunikasi. Ponsel pintar, dengan teknologi canggihnya, memungkinkan pertukaran informasi, foto, dan video secara mudah. Ironisnya, kemajuan teknologi ini juga menyebabkan kurangnya perhatian terhadap lingkungan sekitar dan perubahan gaya hidup dalam berinteraksi sosial. Perubahan sosial budaya juga ditandai dengan masuknya budaya Barat, terutama di kalangan remaja. Hal ini disebabkan oleh penerimaan budaya asing yang mudah, kurangnya pengetahuan, dan pengawasan orang tua yang lemah. Westernisasi, proses adopsi budaya Barat, terjadi karena masyarakat menerima budaya asing tanpa seleksi, sehingga mengakibatkan hilangnya rasa nasionalisme dan jati diri bangsa. Budaya asli Indonesia pun terancam punah karena dianggap kurang menarik dibandingkan budaya Barat oleh generasi muda. Westernisasi memunculkan perilaku menyimpang dari nilai-nilai moral, seperti gaya hidup kebarat-baratan. Meskipun ada sisi positif budaya Barat seperti menghargai waktu dan kedisiplinan, sayangnya, generasi muda lebih sering meniru aspek negatifnya, seperti penyalahgunaan narkoba dan minuman keras. Perilaku ini akan menjadi kebiasaan buruk jika tidak segera dikoreksi. (Wijayanto et al., 2023)

Di era digital saat ini, etika tidak hanya berlaku dalam kehidupan nyata, tetapi juga harus diperhatikan dalam interaksi sosial dan budaya di dunia maya. Media sosial merupakan platform daring yang memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi, berkomunikasi jarak jauh, serta berinteraksi melalui aplikasi berbasis internet. Tujuan utama dari media sosial adalah menghubungkan individu di berbagai lokasi, memberikan ruang untuk partisipasi dan umpan balik terbuka, serta mempercepat pertukaran informasi dalam skala luas. Namun, di samping manfaat yang ditawarkan, media sosial juga membawa dampak negatif yang cukup besar, terutama bagi generasi milenial. Berbagai bentuk kejahatan, seperti pelecehan, kekerasan, dan penipuan, marak terjadi di dalamnya. Oleh karena itu, anak-anak dan remaja perlu mendapatkan bimbingan serta pengawasan ketat dari orang tua, guru, dan pihak terkait guna melindungi mereka dari risiko negatif media sosial. Meskipun demikian, media sosial tetap memberikan manfaat positif, seperti mempererat dan memperbarui hubungan pertemanan. (Firdasar et al., 2022)

### **Solusi yang diberikan**

Indonesia masih menghadapi tantangan dalam penerapan Pancasila yang merata di seluruh wilayah. Ketimpangan sosial, ekonomi, dan hukum masih terjadi di beberapa daerah. Meskipun pembangunan infrastruktur dan ekonomi Indonesia menunjukkan kemajuan

dalam 15 tahun terakhir, dengan rasio 0,28% pada tahun 2020 dibandingkan dengan 0,38% di tahun sebelumnya (Intan Suswita dkk, 2020), potensi ekonomi Indonesia masih tergolong rendah. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembangunan ekonomi yang lebih efektif untuk mendorong kemajuan ekonomi Indonesia. Namun, realitanya, pembangunan yang dilakukan pemerintah masih belum merata dan menimbulkan kesenjangan. Untuk mengatasi ketimpangan ekonomi ini, pembangunan harus diarahkan untuk mengurangi kesenjangan tersebut. Pembangunan dan Keadilan Sosial yang Merata: Pemerintah perlu mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal, termasuk akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Penting juga untuk memberdayakan UMKM lokal dengan akses permodalan dan pelatihan yang memadai. (Muhammad Fakhur Rodzi, 2023)

Penerapan Pancasila di Indonesia masih jauh dari ideal. Alih-alih diterapkan, Pancasila justru mengalami pergeseran makna. Nilai Ketuhanan tergantikan oleh materi, kemanusiaan oleh kebiadaban dan pelanggaran HAM, persatuan oleh perpecahan, musyawarah oleh kebrutalan, dan keadilan sosial oleh keserakahan. Pergeseran ini juga dilakukan oleh penguasa yang menggunakan Pancasila sebagai alat politik untuk mempertahankan kekuasaan, menjadikan Pancasila sebagai simbol kekuasaan dan bukan sebagai pedoman moral bangsa. Reformasi Pendidikan Pancasila yang Holistik: Pendidikan Pancasila harus lebih menekankan praktik nyata, seperti program pengabdian masyarakat, dan pembelajaran keberagaman serta toleransi. Akses pendidikan di daerah terpencil juga perlu ditingkatkan melalui beasiswa dan pemanfaatan teknologi. (Aminullah, 2015)

Pancasila sering disebut sebagai dasar filsafat negara, ideologi negara, atau staatsidee. Sebagai dasar nilai dan norma, Pancasila mengatur penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, termasuk reformasi, harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Pancasila menjadi sumber segala sumber hukum dan kaidah hukum negara, mengatur Republik Indonesia, rakyatnya, wilayahnya, dan pemerintahannya. Penegakan Hukum yang Adil dan Transparan: Aparat penegak hukum harus bersikap adil dan tidak pilih kasih. Transparansi dan pengawasan independen sangat penting untuk memastikan keadilan bagi semua warga negara. Pemberantasan korupsi juga harus diperkuat untuk mencegah penyelewengan dana yang merugikan Masyarakat. (Aminullah, 2015) Penguatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat: Sosialisasi Pancasila perlu dilakukan melalui media sosial, melibatkan influencer dan tokoh masyarakat. Penting juga untuk mendorong dialog dan toleransi antar kelompok masyarakat melalui berbagai kegiatan yang memperkuat rasa kebersamaan dan persatuan. Dengan konsistensi dalam menerapkan solusi-solusi tersebut, diharapkan implementasi Pancasila dapat terwujud secara merata di seluruh Indonesia, bukan hanya sebagai teori, tetapi sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara.

## KESIMPULAN

Pancasila, sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dalam dunia pendidikan, nilai-nilai Pancasila perlu diajarkan secara efektif agar generasi muda dapat memahami serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Di bidang sosial dan budaya, Pancasila menanamkan semangat keberagaman dan toleransi, yang berperan dalam menjaga keharmonisan antar suku, agama, dan budaya di Indonesia. Dalam sektor ekonomi, Pancasila menjadi pedoman dalam mewujudkan keadilan sosial serta mendorong pemberdayaan ekonomi, khususnya bagi kelompok masyarakat yang kurang beruntung, seperti melalui dukungan terhadap UMKM. Dari perspektif sejarah, Pancasila lahir dari perjalanan panjang perjuangan bangsa Indonesia dan mencerminkan nilai-nilai luhur serta cita-cita para pendiri bangsa. Oleh karena itu, penerapan Pancasila secara konsisten di berbagai bidang sangat

penting untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan berkeadaban. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga pedoman nyata dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis serta sejahtera.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amanda Selviana, Emilia Susanti, Julia Elvina, Iis Sholehah, Layyana Syarifah Pane, & Putri Diana. (2024). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Kalangan Generasi Milenial Melalui Media Sosial. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, 2(3), 148–157. <https://doi.org/10.55606/jubpi.v2i3.3075>
- Aminullah. (2015). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan. *Jurnal Ilmiah IKIP Mataram*, 3(1), 620–628.
- Beazant, G. (2006). Character building. *Professional Engineering*, 19(2), 27. [https://doi.org/10.12968/s1467-5560\(22\)60307-5](https://doi.org/10.12968/s1467-5560(22)60307-5)
- Dunn, A. M., Hofmann, O. S., Waters, B., & Witchel, E. (2011). Cloaking malware with the trusted platform module. In *Proceedings of the 20th USENIX Security Symposium* (pp. 395–410).
- Firdasar, A., Savitri, A. A., Ningsih, A. H., & Fitriono, R. A. (2022). Bentuk Nilai-Nilai Sosial dalam Kehidupan Sosial Budaya. *Intelektiva*, 4(3), 1–8.
- Muhammad Fakhur Rodzi. (2023). Pembangunan Infrastruktur Dan Pemerataan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Masyarakat Dan Desa*, 3(2), 151–163. <https://doi.org/10.47431/jmd.v3i2.353>
- Muttaqin, Z. (2019). Pemahaman dan Implementasi Ideologi Pancasila di Kalangan Generasi Muda (Studi Kasus di Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima). *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7(2), 27. <https://doi.org/10.31764/civicus.v7i2.1139>
- Tria, P. N., Cahyaningsih, F. F., Suwandi, R. A., & Fitriono, R. A. (2022). Implementasi Pancasila dalam Bidang Ekonomi di Era Globalisasi. *Gema Keadilan*, 9(3). <https://doi.org/10.14710/gk.2022.16456>
- Wijayanto, F. N., Felicia Sadida, K., Pradipta, I. P., & Maharani, A. (2023). Implementasi Ideologi Pancasila dalam Kebijakan Pemerintah. *Indigenous Knowledge*, 2(3), 205–206.